

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Komitmen Kementerian PUPR Dorong Penerapan Produk Dalam Negeri

34

Kementerian PUPR Raih Peringkat
Pertama Kementerian Dengan
Penggunaan Produk Dalam
Negeri Terbesar

41

Pemantauan dan Evaluasi
Implementasi Kebijakan dalam
Rangka Peningkatan Penggunaan
Aspal Buton di Kementerian PUPR

Daftar Isi

Salam Redaksi

ii-iii

Penerapan Produk Dalam Negeri di Indonesia

Berita Utama

1-3

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Komitmen Kementerian PUPR Dorong Penerapan Produk Dalam Negeri

4-6

Penerapan Produk Dalam Negeri Guna Memperluas Kesempatan Kerja

7-11

Upaya Kementerian PUPR dalam Meningkatkan Belanja Dalam Negeri dan Menekan Impor

12-15

Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementerian PUPR Tahun 2022

16-18

Upaya Pengendalian Impor Kementerian PUPR

19-21

Dorong Kemandirian Bangsa, Cintai Produk Dalam Negeri

Berita Terkini

32-34

TKDN Industri Kecil, Bagaimana Penghitungannya?

35-37

Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Penggunaan Aspal Buton di Kementerian PUPR

Liputan Khusus

22-23

Resmikan Pabrik Lead Rubber Bearing, Kementerian PUPR Dorong Pemanfaatan Produk Dalam Negeri

24-25

Apresiasi terhadap Insan PUPR dalam Penerapan P3DN

26-27

Pesan Menteri Basuki untuk Pembangunan Infrastruktur IKN: Jaga Kualitas, Estetika dan Keberlanjutan Lingkungan

28-29

Ditjen Bina Konstruksi Sinergi dengan Asosiasi Semen Indonesia Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan Menjadi Prioritas

30-31

Kementerian PUPR Raih Peringkat Pertama Kementerian dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terbesar

Softnews

38-40

TKDN Industri Kecil, Bagaimana Penghitungannya?

41-43

Yuk Cari Tahu Apa Sih Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa?

Dewan Redaksi

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** Yosaphat Bisma Wikantayasa. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Maradika, Isabella Laras Anindyo, Agus Firngadi, Nanang Supriyadi. **Redaksi Sekretariat:** Dendy Rahadian, Utami Darma Setiawati, Arif Wicaksono, Galuh Shinta Dewi, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika, **Desain & Tata Letak:** Ryan Wijisovia.

Alamat Redaksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Utama Lt.11, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Penerapan Produk Dalam Negeri di Indonesia

Mengawali tahun 2023 seperti menaruh sebuah harapan baru bagi seluruh masyarakat di Indonesia, terutama dalam bidang infrastruktur. Perlahan tapi pasti seluruh pembangunan infrastruktur yang dikerjakan memberikan dampak positif dalam mengkonektivitaskan masyarakat Indonesia dari sabang hingga marauke. Berbagai fasilitas publik, perumahan masyarakat menengah, pariwisata, dan jalan-jalan nasional di benahi untuk memberikan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas yang harapannya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata.

Sama seperti Tim Redaksi Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Pada Edisi 1 Tahun 2023 ini Kami terus memberikan informasi-informasi terupdate seputar dunia jasa konstruksi. Informasi mengenai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu Gerakan yang di Instruksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam upaya menggunakan, mengkonsumsi dan membelanjakan sebesar-besarnya produk dalam negeri dan meminimalisir pembelanjaan impor dan tenaga kerja asing.

Peraturan terkait Gernas BBI tertuang dalam Keputusan Presiden 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemda dan BUMN untuk membelanjakan anggaran negara sebesar 40% untuk produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan minimal Rp 400 Triliun untuk Produk Dalam Negeri (PDN).

Dalam edisi ini Kami akan membahas upaya-upaya pengendalian Impor Kementerian PUPR dalam menekan

penggunaan barang-barang impor dalam pembangunan infrastruktur. Mekanisme tersebut diterbitkan melalui Buku Kendali Impor dan Tenaga Asing (Buku KITA) yang terbit pada 25 Oktober 2022. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang cara Kementerian PUPR dalam mengendalikan impor, yaitu dengan mekanisme permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing. Dengan nilai pengadaan barang impor secara kumulatif dalam satu paket lebih dari Rp 1 Milyar, sehingga wajib mendapatkan izin dari Menteri PUPR.

Simak juga tentang pencapaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Kementerian PUPR sepanjang tahun 2022 lalu, yang akan menjadi tambahan bacaan para pembaca Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi. Serta apa saja dukungan dan komitmen Kementerian PUPR dalam mendorong penerapan produk dalam negeri guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tidak ketinggalan beberapa informasi terkini yang akan memberikan informasi seputar manfaat rumah tahan gempa produksi dalam negeri. Salah satu jenis dari bangunan tahan gempa yang umum dijumpai di masyarakat adalah Rumah Tahan Gempa (RTG).

Terakhir suguhan menarik dalam rubrik *softnews*, menyajikan informasi mengenai tugas dan fungsi 8 Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa dan penyelenggaraan penghargaan jasa konstruksi bagi insan masyarakat industri yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Semoga suguhan informasi yang diberikan Tim Redaksi dapat meningkatkan informasi bagi masyarakat jasa konstruksi Indonesia, serta dapat segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dari sabang sampai marauke.

SIGAP MEMBANGUN NEGERI...!

Redaksi Buletin Konstruksi menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang (1.) Bersifat Populer (2.) Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Ditjen Bina Konstruksi serta Informasi terkini Seputar Jasa Konstruksi (3.) Panjang tulisan/artikel Minimal 800 kata (1 halaman word) atau Maksimal 2500 kata (2 halaman word) (4.) Pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email: hdkp.djbc@pu.go.id dengan Subject : 'Artikel untuk Buletin Ditjen Bina Konstruksi', disertai dengan data diri berupa biografi singkat, alamat, nomor telepon, fax atau email (5.) Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis (6.) Redaksi berhak melakukan perubahan naskah (editing) tanpa mengubah isi dari tulisan (7.) Tulisan yang tidak memenuhi kriteria dewan redaksi Buletin Ditjen Bina Konstruksi (8.) Dalam satu Edisi Satu Penulis hanya dapat menayangkan satu artikel.

Sumber: web.waskitaprecast.co.id

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Komitmen Kementerian PUPR Dorong Penerapan Produk Dalam Negeri

Penulis:
Muhammad Elan Aqsa

Dalam konteks ekonomi, produk dalam negeri digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara dan menentukan tingkat produksi dan konsumsi di dalam negeri. Produk dalam negeri dihitung dengan menambahkan upah, pajak dan bunga yang dibayar pada produk yang diproduksi di dalam negeri. Pertumbuhan produk domestik bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Produk dalam negeri juga dikenal dengan istilah *Gross Domestic Product* (GDP) yang mengukur total nilai produk yang

dihasilkan oleh suatu negara. GDP dapat dihitung dengan menambahkan nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya satu tahun. GDP dapat digunakan untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi antar negara dan untuk menentukan tingkat pengangguran dan inflasi di suatu negara.

Penerapan produk dalam negeri merupakan salah satu upaya yang penting untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Hal ini karena dengan menerapkan produk dalam negeri, maka akan tercipta ekonomi yang sehat, serta dapat



meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Salah satu cara untuk menerapkan produk dalam negeri adalah dengan meningkatkan promosi produk-produk dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti pameran produk dalam negeri atau melakukan promosi melalui media sosial.

Tujuan yang dicapai dalam penerapan penggunaan produk dalam negeri ini antara lain meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia. Kesempatan kerja juga akan meningkat berkat penggunaan produk dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah yang akan berimbas juga terhadap penghematan devisa negara.

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mendorong instansi/perusahaan untuk menggunakan bahan baku dalam negeri. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia di Bali tanggal 25 Maret 2022, belanja produk dalam negeri dan UMKM sangat penting di tengah kondisi perekonomian yang melesu akibat pandemi Covid-19 dan perang yang memicu inflasi. Presiden Jokowi juga melarang Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN untuk belanja impor terhadap produk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Semua produsen produk dalam negeri dan UMKM didorong untuk

terdaftar pada e-katalog LKPP, yang mana saat ini sudah sekitar 1 juta lebih produk terdaftar pada e-katalog. Agar produk dalam negeri dan UMKM segera terdaftar pada e-katalog, proses perizinan seperti SNI dipermudah dan sederhana.

Kebijakan Presiden untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri juga didukung dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalamnya menginstruksikan Para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengatur perundang-undangan dalam mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu kementerian yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong penerapan produk dalam negeri di Indonesia. Kementerian PUPR bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti jalan, jembatan, dan bangunan-bangunan lainnya. Oleh karena itu, Kementerian PUPR memiliki banyak kesempatan untuk mendorong penerapan produk dalam negeri di Indonesia



dengan cara memilih produk dalam negeri yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang sehat, seperti transparansi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas.

Terbitnya Keputusan Menteri PUPR Nomor 280 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) Kementerian PUPR tahun 2022-2024 adalah realisasi dari instruksi presiden yang menginstruksikan K/L dan PD untuk membentuk Tim P3DN. Tujuan dibentuknya Tim P3DN Kementerian PUPR ini agar memastikan sebesar-besarnya pemanfaatan APBN Kementerian PUPR untuk belanja produk dalam negeri. Direktur Jenderal Bina Konstruksi bertindak sebagai ketua tim pengarah serta tim pelaksana yang dipimpin langsung oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi.

Presiden juga menginstruksikan untuk menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor. Penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing di Kementerian PUPR sendiri pada Tahun 2022 dibatasi sebesar paling tinggi 10% dan pada Tahun 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5% dari pagu Kementerian PUPR. Penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing dapat

diberikan persetujuan dengan syarat yaitu memperhatikan urutan prioritas penggunaan produk dan tenaga kerja dalam negeri serta memastikan ketersediaan produk dan tenaga kerja dalam negeri melalui sumber informasi yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Business Matching Kementerian PUPR merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan pembelian dan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, serta untuk memberikan dukungan kepada pelaku koperasi dan UMKM. Ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai komitmen dalam mengoptimalkan peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri. Forum Business Matching adalah acara yang menjembatani antara pengguna jasa/pemerintah dengan produsen barang/jasa dalam upaya meningkatkan serapan belanja pemerintah atas produk dalam negeri. Sementara itu, pelaku industri dalam negeri atau UMKM, IKM, dan artisan akan mendapatkan jaminan pasar yang akan memungkinkan mereka untuk mempersiapkan produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar pemerintah. Hal ini akan membantu mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan kesempatan untuk menjual produk mereka kepada pemerintah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan mereka dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.



Sumber: kompas.com

Penerapan Produk Dalam Negeri Guna Memperluas Kesempatan Kerja

Penulis:
Fami Qur'ani Yasti & Dewi Tambunan

Meningkatnya angka pengangguran tentu menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. "Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka pengangguran Indonesia 8,42 juta orang pada periode Agustus 2022, naik dari sebelumnya 8,40 juta orang pada Februari 2022." Angka tersebut bukanlah angka yang kecil. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa 8,4 juta orang belum mendapatkan kesempatan kerja di negeri ini, yang tentu saja akan berdampak buruk dan dapat memicu meningkatnya angka kemiskinan dan penurunan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Tidak sedikit juga lulusan baru yang telah menamatkan jenjang perkuliahan sulit menemukan pekerjaan, padahal generasi muda ini telah digadang-gadangkan menjadi tonggak yang akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sangat disayangkan apabila hal tersebut menjadi faktor yang menyebabkan semangat generasi Z pupus karena faktanya banyak yang telah menganggur selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Lalu apa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi semua permasalahan tersebut? Sederhananya, tentu saja dengan

membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Namun muncul pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan membuka lapangan pekerjaan? Indonesia merupakan negara yang sedang memulihkan keadaan ekonominya pasca pandemi Covid 19, karena itu sulit bagi negara ini untuk hanya berfokus pada angka pengangguran saja.

Karena itu dibuatlah alternatif lain untuk memulihkan ekonomi bangsa yang dampak lainnya juga akan berpengaruh pada tingkat pengangguran di Indonesia, yaitu "Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri" atau yang lebih akrab disebut P3DN. Sebenarnya pemimpin Indonesia terdahulu telah menggalakkan aksi untuk mencintai produk dalam negeri, hal ini dimulai pada masa kepemimpinan Bapak Soekarno yang mengangkat slogan "BERDIKARI" yaitu berdiri di atas kaki sendiri, yang mengkampanyekan rakyat agar tidak bergantung pada produk asing, lalu dilanjutkan pada masa Soeharto yang memunculkan lagu "Aku Cinta Buat Indonesia" yang dipopulerkan oleh Bimbo, setelah itu Bapak SBY mengkampanyekan slogan "100% Cinta Indonesia" dengan mendorong perusahaan, produk, dan merek dalam negeri mencantumkan logo tersebut pada kemasan, iklan, dan materi promosi. Sedangkan pada masa Jokowi, beliau menggaungkan slogan "Bangga Buat Indonesia" dan menerbitkan Keppres

24/2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Alasan pemimpin bangsa dari yang terdahulu hingga sekarang giat untuk menggelorakan sampai membuat aturan khusus penggunaan produk dalam negeri tentu tidak remeh, tujuan utamanya yaitu meningkatkan taraf perekonomian dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Alasan Pembelian PDN (Produk Dalam Negeri) dapat meningkatkan utilitas nasional yang bisa membuat industri Indonesia mampu bersaing dengan pasar dunia, selain itu juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta mengurangi pengangguran di sebuah wilayah.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Bapak Ir. Nicodemus Daud, M.Si dalam paparannya Tanggal 13 Januari 2023 di Surabaya menjelaskan bahwa efek yang akan timbul jika mengimplementasikan P3DN setidaknya Rp 400 Triliun akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.7% dari APBN/APBD, dan 0.4% dari BUMN, selain itu juga bisa membuka 2 juta lapangan kerja baru di tanah air. Jika estimasi tersebut benar, kita bisa membayangkan bahwa dengan membelanjakan produk dalam negeri sebesar 400 Triliun rupiah saja bisa mengurangi 1/4 (2



Sumber: beritajatim.com



Sumber: Antara/Wahyu Putro A

dari 8,42 juta) pengangguran yang ada di Indonesia, apalagi jika ditingkatkan hingga melebihi angka tersebut. Dilansir dari website www.kemenkeu.go.id tercatat bahwa belanja negara pada Tahun 2022 telah menghabiskan dana sebesar Rp 3.090,8 Triliun, hal ini tentu saja bisa menjadi kesempatan besar bagi pemerintah untuk bisa meminimalisir angka pengangguran dengan menekan belanja impor.

Namun memang sulit mengatasi kebiasaan menggunakan barang impor, barang tersebut menjadi populer di kalangan masyarakat bahkan di pemerintahan sendiri dikarenakan kelangkaannya di pasar Indonesia, selain itu harganya yang relatif jauh lebih murah dibanding PDN. Hal ini membuat produk lokal dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sepi peminat. Melihat ancaman tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya di berbagai bidang. Presiden Joko Widodo melalui arahnya melarang Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk belanja barang impor jika barang tersebut sudah dapat diproduksi di dalam negeri, dan Beliau menyatakan bahwa belanja PDN dan UMKM sangat penting di tengah kondisi perekonomian yang melesu akibat pandemi Covid-19 dan perang yang memicu inflasi. Oleh karena itu, bagi produsen lokal serta UMKM akan dipermudah proses perizinannya seperti SNI (Standar Nasional Indonesia) sehingga dapat mendaftarkan diri pada e-katalog LKPP

(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah). Per 21 Desember 2022 sudah terdaftar 916.392 produk UMKM dari target awalnya berupa 1 juta produk sesuai harapan presiden.

Untuk bidang infrastruktur sendiri, Kementerian PUPR telah berhasil melebihi target komitmen belanja PDN sebesar Rp 104,98 Triliun untuk Tahun 2022 dan akan ditargetkan bisa meningkat menjadi Rp 118,94 Triliun di Tahun 2023. Selain itu, Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono juga menegaskan bahwa "Pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk dalam negeri, atau walaupun produk dari luar, harus punya pabrik di sini".

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, dapat dipastikan bahwa pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya menstimulus pertumbuhan ekonomi bangsa melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), oleh karena itu diharapkan masyarakat Indonesia juga dapat mengambil andil dengan membantu pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakannya, seperti belanja dan mengajak sanak keluarga untuk membeli dan mencintai produk lokal, sehingga akan tercipta Indonesia sejahtera dengan angka pengangguran yang kecil atau bahkan mungkin tidak ada.

Sumber: www.waskitaprecast.com

Upaya Kementerian PUPR dalam Meningkatkan Belanja Dalam Negeri dan Menekan Impor

Penulis:

Ir. Nicodemus Daud, M.Si
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Rezza Munawir, ST, MT, MMG
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Dwi Haryanti Putri, SE, MM
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Bapak Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN untuk membelanjakan anggaran negara sebesar 40% untuk produk UMKK dan minimal Rp 400 triliun untuk produk dalam negeri, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk mengimplementasikan Inpres tersebut, Kementerian PUPR berkomitmen membelanjakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2022 paling sedikit Rp80,48 triliun. Sementara, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Kementerian PUPR telah melebihi komitmennya yaitu sebesar Rp 111,38 Triliun.

Hal tersebut tercapai tidak lepas dari strategi-strategi yang dilakukan Kementerian PUPR, beberapa arahan, kebijakan,

serta pengaturan diterbitkan untuk terus mengawal belanja APBN di Kementerian PUPR sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk produk Dalam Negeri. Sebagai upaya dalam menerapkan dan memenuhi target pencapaian Produk Dalam Negeri Kementerian PUPR, Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 280 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian PUPR Tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2022.

Langkah pertama yang dilakukan Tim P3DN yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi sebagai Ketua Tim Pengarah dan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi sebagai Ketua Pelaksana melakukan *kickoff meeting* pembahasan program kerja. Dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri dan TKDN secara *massive* dengan tujuan seluruh insan PUPR dapat memahami dan menerapkan produk dalam negeri dalam belanja APBN. Ketua Tim Pelaksana P3DN menerbitkan Mekanisme Perhitungan TKDN Pekerjaan Konstruksi, sehingga semua insan PUPR dapat lebih mudah memahaminya.

Selanjutnya, untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mengendalikan belanja impor, antara lain telah diterbitkan surat Menteri PUPR Nomor PB.0101-Mn/2075

tanggal 17 Oktober 2022 perihal Pengendalian Penggunaan Barang impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mana Surat Menteri tersebut diterbitkan guna mengatur lebih rinci Surat Menteri PUPR No. PB.01.01-Mn/2775 pada tanggal 30 Desember 2020 sekaligus menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur pengendalian belanja impor dan tenaga kerja asing sebesar 10% pada tahun 2022 dan sebesar 5% pada tahun 2023 dan 2024. Dalam surat tersebut mengatur urutan prioritas penggunaan barang/produk Kementerian PUPR serta sumber informasi produk dalam negeri yang bisa dijadikan referensi seperti pada **Tabel 1**. Kewenangan Izin Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi selaku Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR menerbitkan "Buku KITA (Kendali Impor dan Tenaga Asing)" yang memberikan informasi lebih dalam dari surat Menteri PUPR Nomor PB.0101-Mn/2075 yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pengendalian pengadaan barang impor dan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan mengenai pembatasan penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing khusus untuk pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan tol, pada tanggal 23



Gambar 1. Kickoff Meeting Perdana Tim P3DN Kementerian PUPR yang diselenggarakan secara hybrid

No.	Subvarian Asbuton	% Substitusi Aspal Minyak
1	Menteri	di atas Rp 1.000.000.000,-
2	Pejabat Tinggi Madya	paling banyak Rp 1.000.000.000,-
3	Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja Unit Eselon II	paling banyak Rp 500.000.000,-
4	Kepala Balai/Kepala Satuan Kerja Unit Eselon III	paling banyak Rp 200.000.000,-
5	Kepala Satuan Kerja	paling banyak Rp 100.000.000,-

Tabel 1. Kewenangan Izin Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing

Prioritas	Subvarian Asbuton	Kode	TKKD (%)	BMP (%)	TKDN+BMP (%)	SNI
1	Barang Wajib Berstandar	BWB	≥ 25	≤ 15	≥ 40	✓
2	Barang Wajib Tidak Berstandar	BWTB	≥ 25	≤ 15	≥ 40	-
3	Barang Tidak Wajib Berstandar Tipe A	BTWB-A	≥ 25	< 15	$25 \leq \text{TKDN} + \text{BMP} < 40$	✓
4	Barang Tidak Wajib Tidak Berstandar Tipe A	BTWTB-A	≥ 25	< 15	$25 \leq \text{TKDN} + \text{BMP} < 40$	-
5	Barang Tidak Wajib Berstandar Tipe B	BTWB-B	> 25	< 15	< 25	✓
6	Barang Tidak Wajib Tidak Berstandar Tipe B	BTWTB-B	> 25	< 15	< 25	-
7	Produksi Dalam Negeri Tidak Ber-TKDN Tipe A	PDN-A	-	≤ 15	≤ 15	✓
8	Produksi Dalam Negeri Tidak Ber-TKDN Tipe B	PDN-B	-	< 15	≤ 15	-
9	Produksi Dalam Negeri Tidak Ber-TKDN Tipe C	PDN-C	-	-	-	✓
10	Produksi Dalam Negeri Tidak Ber-TKDN Tipe D	PDN-D	-	-	-	-
11	Produk Impor	IMPOR	-	-	-	-

Prioritas	Kewarganegaraan Tenaga Kerja
1	Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
2	Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan perizinan, penyetaraan kompetensi, pencatatan, dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Tabel 2. Urutan Prioritas Penggunaan Barang dan Tenaga Kerja



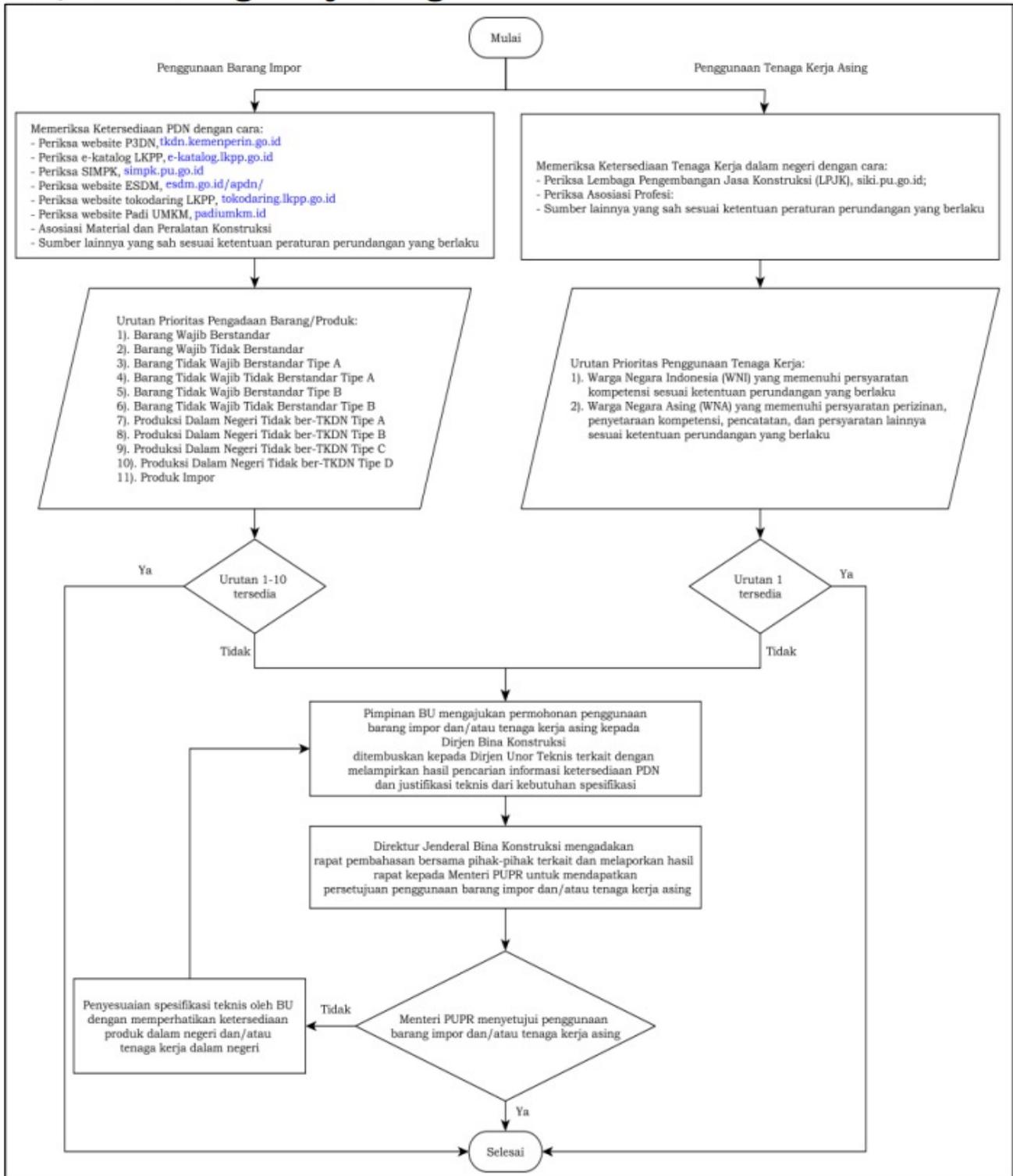
Gambar 2. Pembukaan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Pada Sosialisasi SE Menteri PUPR No 21/SE/M/2022

November 2022 Menteri PUPR telah menerbitkan SE Nomor 21/SE/M/2022 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol, yang harus dijadikan pedoman bagi BUJT dalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol terkait mekanisme penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing. Surat Edaran ini pertama kali disosialisasikan kepada para *stakeholder* pada tanggal 2 Desember 2022.

Mengawali tahun 2023, Bapak Menteri PUPR menerbitkan SE Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Dalam Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa semua pengajuan barang impor dan/atau Tenaga Kerja harus mendapatkan persetujuan Menteri dan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN dan penggunaan barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing dapat diberikan persetujuan dengan syarat: (i). memperhatikan urutan prioritas penggunaan produk dan tenaga kerja dalam negeri; dan (ii) memastikan ketersediaan produk dan tenaga kerja dalam negeri melalui sumber informasi yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja PDN Kementerian PUPR sebesar Rp 118,94 triliun atau 95% dari pagu anggaran Tahun 2023 yang disetujui DPR RI. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden untuk seluruh K/L/PD harus mengurangi impor sampai dengan 5% pada tahun 2023. Selain target komitmen tersebut, melalui Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024 berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan Keputusan Menteri PUPR tentang Ambang Batas Pekerjaan Konstruksi pada bulan Maret 2023 serta Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada bulan September 2023.

Berbagai strategi yang tengah disiapkan ini harus dapat dilaksanakan dan dikerjakan dengan baik. Seluruh Unit Organisasi Kementerian PUPR harus bekerjasama dalam menyelesaikan target penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. Selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi akan melaksanakan dan memastikan untuk menekan penggunaan impor dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sejak dalam proses tender di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi.



Gambar 3. Bagan Alir Urutan Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing untuk KPBU



Sumber: aktual.com

Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementerian PUPR Tahun 2022

Penulis:

Ir. Nicodemus Daud, M.Si
Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR

Rezza Munawir, ST, MT, MMG
Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR

Taufan Santiago
Anggota Tim Pendukung P3DN Kementerian PUPR

Sejak Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), dan BUMN pada kegiatan Business Matching pada tanggal 25 Maret 2022 di Bali untuk membelanjakan anggaran pemerintah untuk belanja produk dalam negeri (PDN) dan melarang pembelian barang impor, hingga saat ini seluruh K/L/PD dan BUMN bergerak terus melaksanakan instruksi tersebut. Pemerintah menargetkan belanja PDN

sebesar Rp400 Triliun (Rp200 Triliun dari 10 K/L dengan APBN terbesar dan Rp200 Triliun dari APBD) untuk produk dalam negeri dan UMKM pada akhir Mei 2022.

Belanja PDN minimal Rp 400 Triliun tersebut, menurut kalkulasi Badan Pusat Statistik (BPS), dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi sebesar 1,71% dan belanja BUMN sebesar 0,4%. Strategi belanja PDN ini diambil pemerintah di tengah kelesuan

ekonomi, untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, krisis iklim, serta perang yang memicu inflasi.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Tim P3DN Kementerian PUPR, termasuk di dalamnya para Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW), yang telah dibentuk melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 280/M/KPTS/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian PUPR Tahun 2022-2024 melakukan pelaksanaan ...

.... verifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pekerjaan konstruksi dengan metode uji petik beberapa paket pekerjaan konstruksi yang merepresentasikan Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Paket diprioritaskan: i) minimal sudah terkontrak dan maksimal sudah selesai dilaksanakan, progres 100%; ii) mewakili provinsi wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah; iii) Proyek Strategis Nasional (PSN) (apabila ada); dan iv) pihak PPK beserta penyedia jasa terkait menyetujui untuk menjadi uji petik.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi selaku Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR menyampaikan surat terkait usulan daftar paket pekerjaan konstruksi tahun 2022 sebagai objek uji petik pemantauan dan evaluasi capaian TKDN di Kementerian PUPR yang disampaikan kepada Direktur Sistem dan Strategi pada unit organisasi terkait. Setelah itu, disepakati 70 paket terpilih yang menjadi objek uji petik verifikasi capaian TKDN. Dari 70 paket tersebut, ketujuh BJKW yang tersebar mulai dari Aceh sampai Papua, memverifikasi masing-masing 10 paket pekerjaan konstruksi pada wilayah kerjanya dengan pendampingan dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan anggota Tim Pendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Inspektorat Jenderal.

Pelaksanaan verifikasi capaian TKDN dilakukan berdasarkan data dan dokumen terkait, diantaranya yang utama yaitu: Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kontrak terakhir, bukti invoice/faktur belanja), dan sertifikat TKDN material konstruksi. dari

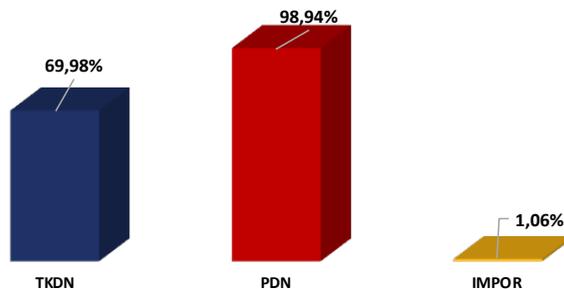


Gambar 4. Kunjungan Lapangan Tim Verifikatur P3DN Kementerian PUPR

hasil pengolahan data terhadap uji petik 70 paket pekerjaan konstruksi dengan total nilai kontrak sebesar Rp10,79 Triliun, didapatkan potret capaian TKDN pekerjaan konstruksi Kementerian PUPR Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (24 paket)

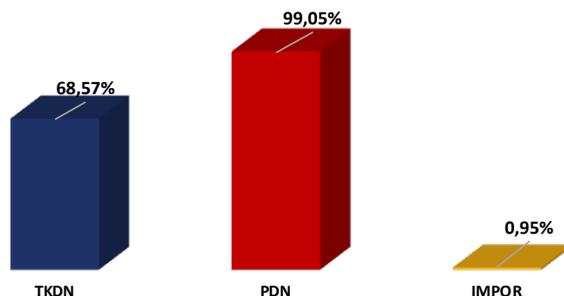
Total nilai kontrak sebesar Rp6,41 Triliun, dengan hasil verifikasi capaian TKDN senilai 69,98%, PDN 98,94%, dan Impor 1,06%.



Gambar 5. Kunjungan Lapangan Tim Verifikatur P3DN Kementerian PUPR

2. Direktorat Jenderal Bina Marga (12 paket)

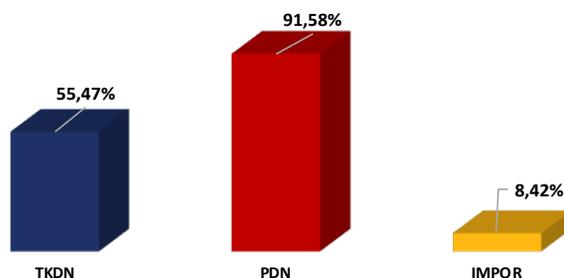
Total nilai kontrak sebesar Rp6,41 Triliun, dengan hasil verifikasi capaian TKDN senilai 68,57%, PDN 99,05%, dan Impor 0,95%.



Gambar 6. Diagram Batang Persentase Hasil Verifikasi Capaian TKDN Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2022

3. Direktorat Jenderal Bina Marga (12 paket)

Total nilai kontrak sebesar Rp6,41 Triliun, dengan hasil verifikasi capaian TKDN senilai 68,57%, PDN 99,05%, dan Impor 0,95%.

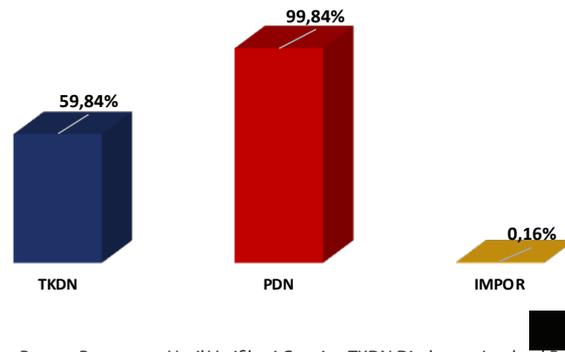


Gambar 7. Diagram Batang Persentase Hasil Verifikasi Capaian TKDN Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2022

4. Direktorat Jenderal Perumahan (12 paket)

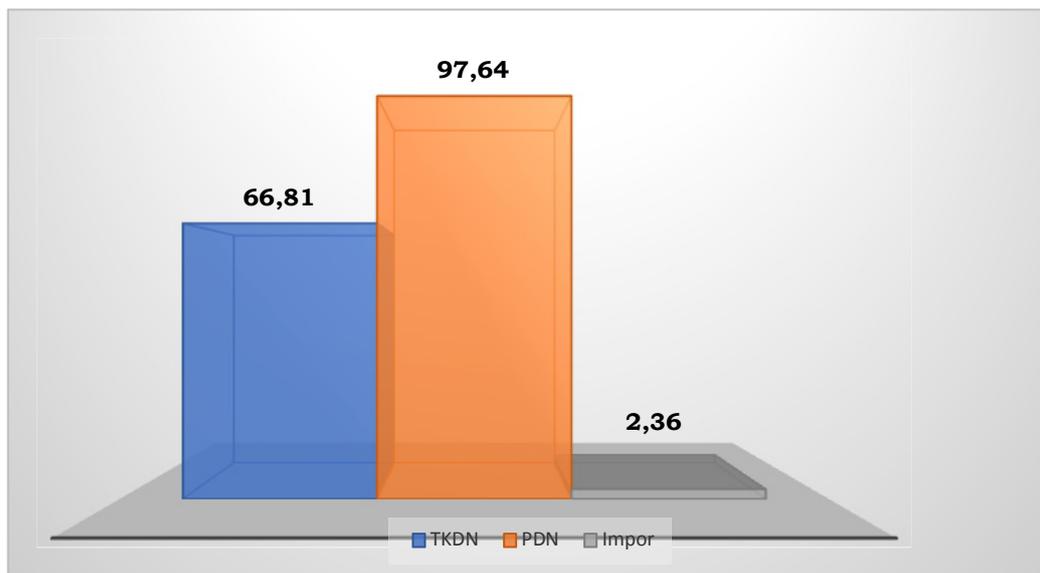
Total nilai kontrak sebesar Rp6,41 Triliun, dengan hasil verifikasi capaian TKDN senilai 59,84%, PDN 99,84%, dan Impor 0,16%.

Sehingga, dari verifikasi terhadap uji petik 70 paket dihasilkan data capaian TKDN sebesar 66,81% (Rp5,37 Triliun), PDN sebesar 98,27%



Gambar 8. Diagram Batang Persentase Hasil Verifikasi Capaian TKDN Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2022

(Rp7,75 Triliun), dan Impor sebesar 1,73% (Rp187,24 Miliar). Ilustrasi gambar sebagaimana diagram berikut ini.



Gambar 9. Diagram Batang Persentase Hasil Verifikasi Capaian TKDN Kementerian PUPR Tahun 2022

Mengapa terjadi deviasi antara PDN dengan TKDN? Hal tersebut terjadi karena permasalahan utama yaitu masih banyak ditemukan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM yang belum memiliki sertifikat TKDN dan/atau memiliki sertifikat TKDN namun telah kadaluwarsa, sehingga nilai TKDN produk sama dengan 0%. Hal ini berdampak mengurangi nilai capaian TKDN pada paket pekerjaan konstruksi terkait. Sehingga, isu strategis tahun 2023 yang harus dituntaskan adalah mendorong sebanyak mungkin penyedia PDN menyertifikasi TKDN produknya.



Sumber: antara.com

Upaya Pengendalian Impor Kementerian PUPR

Penulis:

Disaintina Ari Nusanti

Kepala Sub Direktorat Kelembagaan, Material, Peralatan dan Usaha Jasa Konstruksi

Rezza Munawir, ST, MT, MMG

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Reynaldo Pilar Surya

Staf TKDN Konstruksi

Presiden Joko Widodo melalui Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memerintahkan semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk Kementerian PUPR untuk mengendalikan belanja impor sampai dengan 5% di tahun 2023.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, Kementerian PUPR menerbitkan Surat Menteri PUPR No. PB.01.01-Mn/2075

tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana pada butir 4 dari surat tersebut disebutkan bahwa mekanisme lebih detail diatur oleh Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR. Mekanisme tersebut diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2022 dan diberi nama Buku KITA (Kendali Impor dan Tenaga Asing).

Dalam buku tersebut dijelaskan tentang cara Kementerian PUPR dalam mengendalikan impor, yaitu dengan mekanisme permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/ atau tenaga kerja asing. Dengan nilai pengadaan barang

impor secara kumulatif dalam satu paket lebih dari Rp 1 Milyar, sehingga wajib mendapatkan izin dari Menteri PUPR.

Khusus dalam edisi ini, Kami Tim Pelaksana P3DN Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menjelaskan tentang cara mendapatkan izin menggunakan barang impor dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan informasi dalam Buku KITA, berikut penjelasannya :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket wajib melakukan pencarian informasi produk dalam negeri (PDN) untuk menggantikan kebutuhan barang impor melalui sumber informasi sesuai dengan Tabel 1, sekaligus memperhatikan 11 urutan prioritas produk pada Buku KITA.
2. Jika prosedur nomor 1 tidak dapat dipenuhi, PPK mengirimkan nota dinas permohonan persetujuan penggunaan barang impor dengan melampirkan

pembahasan sebelumnya di tingkat balai;

6. Setelah menerima nota dinas permohonan, Pejabat Tinggi Pratama terkait melakukan rapat pembahasan kembali bersama Kepala Balai, Kepala Satker, PPK, penyedia jasa, serta Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) unit organisasi untuk memastikan ketersediaan PDN pengganti barang impor;
7. Selanjutnya, apabila masih terdapat usulan penggunaan barang impor masih berjumlah di atas Rp 1 Milyar, maka Pimpinan Tinggi Pratama terkait menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi selaku Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR, untuk selanjutnya dilakukan rapat pembahasan bersama pemohon beserta tim terkait, serta seluruh pihak terkait baik dari kementerian, lembaga, asosiasi, produsen, penyedia barang, ataupun agen/distributor;

No	Sumber Informasi
1	Website P3DN Kementerian Perindustrian: tkdn.kemenperin.go.id
2	Website katalog elektronik LKPP: e-katalog.lkpp.go.id
3	Website SIMPK Kementerian PUPR: simpk.pu.go.id
4	Website APDN Kementerian ESDM: esdm.go.id/apdn
5	Website Bela Pengadaan LKPP: tokodaring.lkpp.go.id
6	Website Padi UMKM Kementerian BUMN: padiumkm.id
7	Asosiasi Material dan Peralatan Konstruksi
8	Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Tabel 5. Sumber Informasi Produk Dalam Negeri

justifikasi teknis kebutuhan spesifikasi barang impor secara berjenjang dimulai dari ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja;

3. Apabila disetujui, Kepala Satuan Kerja (Satker) menyampaikan nota dinas hasil revidi serta permohonan persetujuan penggunaan barang impor kepada Kepala Balai;
4. Sebelum memberikan persetujuan, Kepala Balai melakukan rapat pembahasan usulan penggunaan barang impor bersama tim Balai, Kepala Satker, PPK, dan penyedia jasa dari paket terkait. Dalam rapat ini, sangat dimungkinkan jika penggunaan barang impor tidak jadi dilaksanakan atau berkurang karena ditemukan PDN sesuai kebutuhan spesifikasi;
5. Apabila masih ada barang impor yang masih diusulkan untuk digunakan, maka selanjutnya Kepala Balai menyampaikan nota dinas permohonan izin penggunaan barang impor kepada Pejabat Tinggi Pratama terkait dengan melampirkan justifikasi teknis serta hasil rapat

8. Hasil rapat pembahasan antara Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi bersama seluruh pihak terkait dituangkan ke dalam Berita Acara kesepakatan rapat yang nantinya akan menjadi lampiran penyampaian nota dinas dari Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi serta nota dinas permohonan persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada Menteri PUPR, untuk selanjutnya menunggu persetujuan. Menteri PUPR mempunyai kewenangan untuk menyetujui/tidak menyetujui permohonan penggunaan barang impor.

Metode ini terbukti dapat menekan belanja impor sampai dengan 70% terhadap usulan semula, dari Rp 56,54 Milyar menjadi Rp 16,02 Milyar. Hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Selain itu, untuk menekan belanja impor, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi melakukan pemantauan penggunaan barang impor pada

Justek Usulan Barang Impor			
No.	Jenis Barang Impor	Status	Keterangan
1	Sports Vinyl 8 mm Heavy Duty ex. Tarkett	Impor	<ul style="list-style-type: none"> • Permukaan lantai dengan pelapis lantai vinyl dengan ketebalan 8 mm diperlukan untuk keperluan olahraga (heavy duty), • Memiliki sertifikasi pengakuan dari organisasi olahraga FIBA, BWF, ITTF dan organisasi olahraga lainnya
2	Fire Supression	Impor	Untuk fungsi ruang bersifat khusus yaitu data center, sistem proteksi pemadam kebakaran penggunaan <i>system fire suppression</i> sangat diperlukan
3	AC Presisi	Impor	Untuk fungsi ruang bersifat khusus yaitu data center, penggunaan AC Presisi diperlukan untuk menjaga peralatan utama dengan pengkondisian udara yang baik
4	Generator Set 400kVa (Build Up)	Impor	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan Genset secara kapasitas yaitu 400 kVa • Sudah dilakukan presentasi Genset dengan kapasitas 400kVa oleh produsen PT. Conductorjasa Suryapersada • Potensi PDN • Konfirmasi UGM
5	Generator Set 2500 KVa (Build Up)	Impor	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan Genset secara kapasitas yaitu 2500 kVa • Sudah dilakukan presentasi Genset dengan kapasitas 2500kVa oleh produsen PT. Conductorjasa Suryapersada • Potensi PDN (Secara Teknis dapat terpasang) • Konfirmasi UGM
6	Perangkat Distribusi Data & Data Center	Impor	Berdasarkan surat UGM 14733/JUN1.PV/Dit-PDP/PR.00.00/2022 tanggal 27 Desember 2022 disampaikan terkait perangkat data center, sehubungan perangkat aktif jaringan tulang punggung dan WLC Controller perangkat access point yang dibangun di UGM menggunakan produk Cisco, untuk itu dengan pertimbangan kompatibilitas integrasi dengan jaringan eksisting UGM maka perangkat sistem jaringan dan data centre pada gedung GIK untuk dapat menggunakan produk Cisco.

Gambar 10. Rapat Pembahasan Penggunaan Barang Impor

paket pekerjaan konstruksi (secara uji petik). Melalui metode ini diharapkan dapat menekan dan mengurangi penggunaan barang impor dalam pembangunan infrastruktur, serta memanfaatkan bahan material dan bangunan yang ada di Indonesia sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden RI Joko Widodo.



Gambar 11. Pemantauan Penggunaan Barang Impor



Sumber: www.kemenkopmk.go.id

Dorong Kemandirian Bangsa, Cintai Produk Dalam Negeri

Penulis:

Kristinawati Pratiwi Hadi, SIP, M.Si
Jabfung Pranata Humas DJBK

Aditya Anwar, SH, ME, M.P.P
Kepala Balai P2JK Yogyakarta

Mencintai produk dalam negeri telah sejak awal digaungkan oleh Presiden pertama Indonesia Bapak Soekarno. Pada saat tersebut Presiden Soekarno mencanangkan gerakan "Berdiri di atas Kaki Sendiri" atau "Berdikari" dengan konsep mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri di atas produk-produk asing.

Gerakan cinta produk dalam negeri ini dilanjutkan pula di era-era selanjutnya, seperti pada Era Presiden Soeharto kita mengenalnya dengan gerakan 'Aku Cinta Indonesia' atau 'ACI' serta slogan 'Aku Cinta Buatan Indonesia'. Sedangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikampanyekan

slogan '100 % Cinta Indonesia', dimana semua perusahaan dan produsen didorong untuk mencantumkan logo '100 % Cinta Indonesia' pada kemasan, iklan, dan materi promosi produknya. Kini di era Presiden Joko Widodo, gerakan mencintai produk Indonesia dituangkan dalam bentuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Salah satu amanah gerakan ini adalah Pemerintah Pusat, Daerah, dan BUMN diinstruksikan menggunakan APBN/D untuk mengkonsumsi atau membelanjakan sebesar-besarnya produk dalam negeri dan seminimal mungkin belanja barang impor dan tenaga kerja asing. Beberapa peraturan terkait Gernas BBI adalah Keppres 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemda dan BUMN untuk membelanjakan anggaran negara sebesar 40% untuk produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan minimal Rp 400 Triliun untuk Produk Dalam Negeri (PDN).

Guna mensukseskan kebijakan ini, pemerintah juga mengeluarkan larangan impor kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan BUMN terhadap produk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri serta mempermudah seluruh proses perizinan seperti pembuatan Sertifikat Nasional Indonesia (SNI) bagi produsen dalam negeri sehingga dapat mempermudah produsen dalam negeri untuk mendaftarkan produknya di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali tahun 2022 lalu, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya belanja produk dalam negeri dan UMKM terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi yang sempat terpuruk akibat pandemi covid-19 dan kondisi geopolitik luar negeri yang tidak menentu. Kementerian PUPR tentu menyambut baik dan mendukung penuh kebijakan ini. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan dikeluarkannya beberapa regulasi, diantaranya : Keputusan Menteri PUPR nomor 280 tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri (P3DN) Tahun 2022-2024 ; Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18 tahun 2022 tentang Pengelolaan Katalog Sektoral Kementerian PUPR dalam Pengadaan Barang/Jasa ; Surat Menteri PUPR nomor 2775 tahun 2020 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR. Keharusan Penggunaan Material/Bahan Produk Dalam Negeri atau Diproduksi Dalam Negeri. Penggunaan Non Produk Dalam Negeri harus dengan persetujuan pejabat tinggi madya ; dan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 21 tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Import dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam berbagai kesempatan pun selalu menegaskan bahwa Pembangunan Infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk

dalam negeri atau kalau pun harus menggunakan produk luar negeri, rencana penggunaannya sudah dapat persetujuan pejabat tinggi madya dan proses produksi produk tersebut sudah dilakukan di Indonesia. Ketentuan ini dipertegas dengan dikeluarkannya SE Menteri PUPR nomor 2775 tahun 2020 tentang Penggunaan PDN pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR.

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) Wilayah D.I. Yogyakarta sebagai salah satu unit kerja di Kementerian PUPR ikut menggalakan penggunaan PDN salah satunya dengan melaksanakan Kegiatan Pendampingan Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN di Balai P2JK Wilayah D.I. Yogyakarta. Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Selasa 27 Desember 2022 tersebut, yang bertindak sebagai narasumber adalah Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud, dan SubKoordinator TKDN Konstruksi Rezza Munawir Manik.

Dalam paparannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kementerian PUPR, Nicodemus Daud menyampaikan bahwa Kebijakan P3DN ini akan memberikan dampak yang baik bagi bangsa karena akan meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia, meningkatkan kesempatan kerja, penghematan devisa negara dan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah. Lebih lanjut diterangkan bahwa strategi penerapan P3DN dilaksanakan dalam 3 kerangka, yaitu melalui kebijakan dan regulasi, kelembagaan/institusi, serta melalui pendanaan. Kebijakan dan regulasi contohnya dengan melakukan perubahan regulasi yang menghambat atau tidak sesuai, integrasi sistem informasi, penerapan sanksi, dan seterusnya. Penerapan pada kelembagaan/institusi contohnya melalui pembentukan Tim Nasional P3DN, Pembentukan Tim P3DN pada K/L/D dan BUMN, dan lain sebagainya.

Sedangkan yang melalui kerangka pendanaan dilakukan diantaranya dengan mencanangkan komitmen belanja PDN tiap K/L/D dan BUMN minimal 40 %, penerapan pemberian preferensi harga PDN pada PBJ Pemerintah, pembatasan belanja impor maksimal 5 % pada tahun 2023 dan kewajiban pembelian barang dengan nilai TKDN minimal 25 % + BMP \geq 40 % seperti yang disebutkan dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. BMP sendiri



Gambar 12. BP2JK DI Yogyakarta

adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia. Sedangkan Preferensi harga adalah insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat penerima. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp 1 Miliar.

Pada Sesi kedua, SubKoordinator TKDN Konstruksi Rezza Munawir Manik dalam materinya memberikan gambaran yang lebih jauh tentang tentang Mekanisme penerapan ketentuan TKDN Pekerjaan Konstruksi. Salah satu yang dijelaskan adalah tentang perhitungan TKDN Material Konstruksi yang bisa dinilai jika dan hanya jika memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku (jika tidak ada, maka TKDN = 0%) ; jika tersedia Barang Wajib

(TKDN min 25% + BMP \geq 40%), maka tidak diperkenankan membeli barang lain dibawahnya ; barang impor dapat digunakan, dimana syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih rinci terkait TKDN, dapat dilihat pada website Kementerian Perindustrian, di www.tkdn.kemenperin.go.id.*

Guna memastikan ketentuan tentang PDN ini dapat diterapkan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Balai P2JK Wilayah DIY, Kepala Balai Aditya Anwar dalam kesempatan ini mendorong seluruh Pokja agar selalu berupaya untuk meningkatkan pemahamannya terhadap aturan-aturan terkait PDN dan mengajak untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia dengan mendukung penuh penerapan Gernas BBI yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.*



Sumber: Dok. Magdatama

Resmikan Pabrik Lead Rubber Bearing, Kementerian PUPR Dorong Pemanfaatan Produk Dalam Negeri

Penulis:
Tim Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Karawang – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Wakil Bupati Karawang Aep Syaepulloh meresmikan Pabrik *Lead Rubber Bearing* (LRB), *Bearing*, *Expansion Joint*, dan Fasilitas Uji *Seismic Isolator* – msLAB di PT Magdatama Multi Industri, *Karawang International Industrial City* (KIIC), Senin (30/1). Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, keberadaan pabrik ini sesuai dengan arahan dari Presiden RI

Joko Widodo untuk mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

“Di tengah kondisi Indonesia yang rawan gempa bumi, keberadaan pabrik bearing ini relatif penting untuk infrastruktur strategis di Indonesia. Terlebih industri karet di Indonesia sekitar Rp 69 T, jumlahnya cukup tinggi,” kata Menko Airlangga.

Pabrik LRB, *Bearing*, *Expansion Joint*, dan Fasilitas Uji *Seismic Isolator* – msLAB milik PT Magdatama Multi Industri ini



Sumber: Shafira Cendra Arini/detik.com

mempekerjakan 200 SDM dan memiliki kapasitas produksi sebanyak 14.000 unit per tahun.

“Produksinya dapat memenuhi kebutuhan Kementerian PUPR, dan semuanya lokal baik baja maupun karetinya. Sehingga ke depan perlu dipertimbangkan untuk bangunan, karena di negara lain juga LRB digunakan untuk bangunan,” jelas Menko Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa nantinya akan mulai menerapkan penggunaan LRB pada bangunan. “LRB tujuannya untuk meredam daya gempa, dan dengan ide dari Bapak Menko tadi nanti akan kami kembangkan untuk gedung-gedung di kawasan yang rentan gempa di Indonesia,” jelas Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga terus berupaya mendorong pemanfaatan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur, dengan menggunakan produk-produk yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi dari Kementerian Perindustrian.

“Kementerian PUPR mendorong supaya produksi lokal lebih masif. Terlebih di Indonesia sudah sekitar 2700 km jalan tol, yang sudah kita bangun baru sekitar 1900 km, jadi jangan sampai untuk LRB kita harus impor terus. Dan saya kira LRB ini memiliki TKDN yang tinggi yaitu 78,75%,” jelas Menteri Basuki.

Selain LRB, PT Magdatama Multi Industri juga memproduksi *Expansion Joint* yaitu *Strip Seal Joint* yang memiliki nilai TKDN sebesar 45.45% dan *Seismic Modular Joint* sebesar 55.95%. *Expansion Joint* tersebut telah diaplikasikan pada beberapa proyek Jalan Tol dan Jembatan di Indonesia, seperti Jalan Tol

Pekanbaru-Dumai, 6 Ruas Tol DKI – Ruas Kelapa Gading, MRT Lebak Bulus, LRT Palembang, Jembatan Holtekamp, dan lain-lain. Saat ini, penggunaan LRB juga telah disiapkan untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen.

Berdasarkan Spesifikasi Khusus SKh-1.7.47 yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR, LRB harus diuji secara kondisi dinamik gempa untuk membuktikan performa karakteristiknya sebelum dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Sehingga, pada pabrik PT Magdatama Multi Industri juga tersedia fasilitas pengujian dinamik gempa dengan kecepatan tinggi untuk *Seismic Isolator* pertama di Indonesia, yaitu MsLAB yang juga terbesar di Asia Tenggara.

Terakhir, Direktur Utama PT Magdatama Multi Industri Magdalena Santy berterimakasih atas dukungan Pemerintah, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian PUPR dalam mendorong peningkatan produksi dalam negeri. “Terima kasih juga untuk Kementerian PUPR karena telah mendampingi kami dalam melaksanakan pengujian produk-produk kami. Semoga kami dapat terus memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam negeri,” tandas Magdalena.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Sekretaris BPJT Triono Junoasmono. (*)



Sumber: Dok. PUPR

Apresiasi terhadap Insan PUPR dalam Penerapan P3DN

Penulis:

Ir. Nicodemus Daud, M.Si
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Rezza Munawir, ST, MT, MMG
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Dwi Haryanti Putri, SE,MM
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Kementerian PUPR sebagai Kementerian yang bertugas sebagai garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur di tanah air memiliki tanggung jawab yang besar. Kewajiban penggunaan material dalam negeri menjadi prioritas karena dengan belanja produk dalam negeri akan menimbulkan *multiplier effect* bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia seperti dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, meningkatkan investasi serta dapat meningkatkan lapangan kerja. Untuk belanja produk dalam negeri sendiri pada tahun anggaran 2022, Kementerian PUPR memiliki komitmen sebesar paling sedikit Rp80,48 triliun dan telah terealisasi sebesar sebesar Rp104,98.

Pencapaian tersebut tentunya merupakan preseden yang baik bagi kinerja Kementerian PUPR yang akan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam pidato Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada hari bakti PUPR ke 77 menyampaikan bahwa saat ini kepercayaan publik kepada Kementerian PUPR semakin besar. Hal tersebut harus terus dijaga dan dipelihara demi mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam rangka dalam rangka hari bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke-77 (tujuh puluh tujuh) tersebut diberikan penghargaan kepada *stakeholder* Kementerian PUPR sebagai



bentuk apresiasi dalam pelaksanaan bidang konstruksi, salah satunya adalah diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang memiliki kinerja terbaik dalam mendukung implementasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya indikator apa saja yang digunakan untuk penilaian ini? Terdapat 6 (enam) indikator antara lain: (1) Presentase realisasi belanja produk dalam negeri; (2) Presentase capaian TKDN Pekerjaan konstruksi (3) Presentase penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing (dalam satu paket); (4) Presentase penggunaan barang bersertifikat TKDN; (5) Presentase penggunaan barang bersertifikat SNI; dan (6) Presentase belanja produk UMKK.

Setelah dilakukan penilaian oleh Tim dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi terdapat 3 Pejabat Pembuat Komitmen yang berasal dari Direktorat Jenderal Bina Marga, yang diusulkan sebagai penerima penghargaan yaitu:

1. PPK 1.2 Provinsi DIY, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provisini D.I Yogyakarta, BBPKN dengan nama paket Pembangunan Jalan Baru Tepus - Jerukwudel(SBSN MYC)
2. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus, Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara, Balai Penyediaan Perumahan Maluku dengan nama paket Pembangunan

Rumah Susun ASN BPKP Maluku Utara

3. PPK Sungai dan Pantai II, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ws. Palu-Lariang, Ws. Parigi-Poso, Ws. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III dengan nama paket Rehabilitation and Reconstruction of Palu Coastal Protection, Central Sulawesi Province

Selanjutnya penerima penghargaan tersebut ditetapkan pada tanggal 30 November 2022, melalui Keputusan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Stakeholder Penerima Penghargaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke-77 atas Kinerjanya Mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dan disampaikan saat Malam Penganugerahan Penghargaan Jasa Konstruksi Tahun 2022. Penghargaan disampaikan oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi selaku Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Bapak Menteri PUPR terhadap kinerja insan PUPR dalam menerapkan P3DN yang diharapkan akan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerjanya dan kebanggaan bagi penerima atas pencapaiannya.



Sumber: Setkab/era.id

Pesan Menteri Basuki untuk Pembangunan Infrastruktur IKN: Jaga Kualitas, Estetika dan Keberlanjutan Lingkungan

Penulis:
Tim Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Penajam Paser Utara – Memanfaatkan libur Sabtu-Minggu (4-5/2/2023), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, termasuk bangunan pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Tiba di Kota Balikpapan Kalimantan Timur Pak Bas sapaan Menteri PUPR bergegas memasuki kendaraan bersama dengan rombongan untuk segera menuju

proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Penajam Paser, Kalimantan Timur.

Setelah berkendara kurang lebih 2,5 jam dengan menembuh jarak sekitar 76,6 KM Bapak Menteri PUPR beserta rombongan melakukan survei langsung progress pembangunan infrastruktur yang akan menjadi pusat Ibu Kota Negara (IKN) Baru Nusantara. Hingga saat ini Kementerian PUPR mencatat sudah melaksanakan 31 paket pekerjaan, yang dilakukan oleh

kontraktor, konsultan manajemen konstruksi dan supervisi, yang terdiri dari pekerjaan land development, hunian pekerja, jalan logistik, jalan tol, embung dan drainase, intake air baku, kantor kementerian koordinator, sumbu kebangsaan, kompleks kantor dan istana negara.

Dalam tinjauannya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau lokasi proyek pusat pemerintahan di IKN Nusantara, mengatakan bahwa sejauh ini progres fisik infrastruktur IKN keseluruhan sudah 14% dan berjalan baik sesuai dengan 3 prinsip utama, yakni untuk menjamin kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan. "Visi *Smart Forest City* harus menjadi panduan dan orientasi kita bekerja. Hati-hati, harus seminimal mungkin menebang pohon dan mengupas tebing. Justru kita memanfaatkan pohon dan tebing yang ada untuk lansekap *view* kawasan yang bagus," kata Menteri Basuki.

Adapun implementasi keberlanjutan dan menjaga kondisi alam di tanah borneo dilakukan dengan membatasi secara ketat penebangan pohon eksisting yang betul-betul sesuai dengan rencana manfaat jalan dan tapak bangunan, serta mempertahankan bentang alam yang ada di lapangan (elevasi, kontur, posisi) dibawah pengawasan ketat konsultan manajemen konstruksi dan supervisi pekerjaan.

Menteri Basuki juga berpesan agar kendaraan *Over Dimension and Overload* (ODOL) tidak melintas di area KIPP IKN. "Saya tegas soal ODOL, sudah ada aturannya. Kita harus memberi contoh yang baik, untuk truk angkut material jangan *overload*," kata Menteri Basuki. Prinsip-prinsip dalam pembangunan infrastruktur seperti menghijaukan kembali hutan yang gundul, dengan menanam bibit pohon-pohon baru serta menjadi keberlanjutan konstruksi harus dilakukan. Untuk menjadi contoh dalam penerapan kebijakan serta komitmen Kementerian PUPR dalam menjaga keseimbangan alam dan lingkungan.

Tinjauan selanjutnya bangunan pemerintahan di KIPP IKN Nusantara di antaranya pembangunan Sumbu Kebangsaan Tahap I meliputi Zona 1 (*riparian, visitor center*), Zona 2 (*ceremonial lawn, plaza, gedung retail, toilet*), Zona 3 (*central promenade, wetland, forest trail*), Zona 4 (*shared street*), Zona 5 (*shared street*).

Pada kesempatan yang sama, saat meninjau Rumah Susun (Rusun) Pekerja, Menteri Basuki meminta agar setiap unit rusun ditempati maksimal 8 pekerja, sehingga kamar lebih lega.

Menteri Basuki juga menginstruksikan untuk ditambah kipas angin (*blower*) minimal 2 unit untuk dipasang di setiap lorong rusun guna memperbaiki sirkulasi udara dan meredam udara panas. Total rusun dibangun 22 tower dengan daya tampung 14.000 pekerja.

Tidak hanya meninjau pusat KIPP di IKN dan Rusun para pekerja pembangunan IKN, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melanjutkan tinjauan ke progres pembangunan Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3000 liter/detik yang akan dilengkapi dengan jaringan pipa transmisi untuk mendukung penyediaan air baku di IKN.

Sejauh ini terlihat sudah mencapai 82% pembangunan Intake Sungai Sepaku dibangun dengan konsep bendung gerak atau obermeyer dan lebar 117,2 meter, serta tinggi 2,3 meter. Selain Intake Sungai Sepaku, Kementerian PUPR juga melakukan sejumlah upaya lainya untuk memenuhi kebutuhan air di IKN Nusantara.

Upaya tersebut antara lain melalui pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang akan rampung pada Desember 2023 mendatang dan instalasi pengelolaan air (IPA) Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 5.000 liter/detik. Kementerian PUPR juga telah melakukan studi kelayakan Bendungan Selama Yu pada 2021 silam dengan potensi air baku 3.950 liter/detik.

Hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kasatgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga, Dirut PT Wijaya Karya Agung Budi Waskito, Dirut PT. Brantas Abipraya Sugeng Rochadi, Dirut PT PP Novel Arsyad, Dirut PT Adhi Karya Entus Asnawi, dan Dirut PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono. (Tri)



Sumber: sig.id

Ditjen Bina Konstruksi Sinergi Dengan Asosiasi Semen Indonesia Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan Menjadi Prioritas

Penulis:

Indri Eka Lestari

Staf Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Hari Maradika

Staf Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Asosiasi Semen Indonesia pada Jumat, (17/2) di Jakarta. Sinergi itu dilakukan dalam rangka merealisasikan pembangunan konstruksi yang ramah lingkungan, dilatarbelakangi kebutuhan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur yang masif dikerjakan Pemerintah saat ini, Kementerian PUPR bersama Asosiasi Semen Indonesia memiliki visi yang sejalan

dalam mendorong penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan sebagai upaya untuk memitigasi dampak konstruksi terhadap lingkungan.

Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan dalam pertemuan tersebut menyampaikan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan kata lain,



pembangunan infrastruktur yang kita lakukan, harus mengarah pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Yang tidak kalah penting juga dalam tujuan sinergi ini adalah meningkatkan pemahaman untuk mendorong optimalisasi penggunaan material semen ramah lingkungan serta meningkatkan penggunaan material semen dalam negeri yang harus tetap berinovasi untuk menghasilkan produk semen yang dapat memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur” Ucap Yudha.

Lebih lanjut Yudha menyampaikan hal tersebut menindaklanjuti instruksi yang diberikan oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo untuk mengurangi penggunaan bahan material konstruksi impor dalam pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian kita bersama. Maka dari itu, pasokan sumber daya material dan peralatan konstruksi dalam negeri menjadi salah satu faktor penentu yang perlu dikelola dengan baik, untuk memastikan ketersediaannya baik dari segi kuantitas dan kualitas, tidak terkecuali untuk rantai pasok material semen.

Kementerian PUPR telah menerbitkan serangkaian kebijakan strategis, salah satunya adalah Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Semen *Non-Ordinary Portland Cement* (Non OPC) pada pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Pada instruksi menteri tersebut diamanatkan, bahwa untuk mewujudkan pembangunan konstruksi yang berkelanjutan, diperlukan optimalisasi penggunaan material yang ramah lingkungan dalam pekerjaan konstruksi, namun tetap memenuhi persyaratan spesifikasi material untuk tiap-tiap jenis pekerjaan konstruksi.

Diharapkan adanya kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dan Asosiasi Semen Indonesia ini dapat menjadi awal yang baik dan menjadi langkah sinergi untuk mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkelanjutan, kompeten, efektif, dan efisien. Saya yakin kita bisa mewujudkan hal tersebut dengan kolaborasi yang terpadu, tepat dan fokus dari kedua belah pihak.



Sumber: Dok. PUPR

Kementerian PUPR Raih Peringkat Pertama Kementerian Dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terbesar

Penulis:

Hari Maradika

Staf Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Ryan Wijisovia

Staf Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih peringkat pertama Kementerian dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) terbesar pada acara penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemitran

dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain Kementerian PUPR, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dan PT Semen Indonesia dalam kategori BUMN.

Presiden mengatakan, Kementerian PUPR mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah melaksanakan



Sumber: Dok. PUPR

implementasi PDN dengan baik dari seluruh pagu anggaran yang dipercayakan.

“Dulu saya ingat urusan aspal saja 80% kita impor. Kita punya Aspal Buton, saya perintah langsung Menteri PUPR. Kita bikin jalan, deposit aspal kita di Buton besar sekali malah kita impor. Jadi kalau sekarang Pak Menteri PUPR juara sudah betul, penilainya betul menetapkan juara satu,” kata Presiden.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena hal ini sangat strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan Menteri Perindustrian, targetnya 95% dari Pagu Anggaran barang dan jasa harus dibelikan PDN. Kalau ini bisa dilakukan, industri dalam negeri dan UMKM akan hidup dan berkembang,” kata Presiden.

Dikatakan Presiden, berdasarkan informasi dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PDN yang sudah masuk e-katalog sudah sebanyak 3,4 juta produk, dari sebelumnya hanya sebanyak 50 ribu. “Kalau sudah masuk e-katalog, jangan dibiarkan tapi dibeli. Kementerian/Lembaga,

BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi, Kota atau Kabupaten, jangan hanya melihat e-katalog, percuma kalau tidak dibeli,” kata Presiden.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam berbagai kesempatan mengatakan, untuk mengantisipasi inflasi Kementerian PUPR komitmen dalam proses pengadaan untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Menteri Basuki berpesan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional.

“Pascapandemi ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang di larang impor,” kata Menteri Basuki.

Berdasarkan data e-monitoring Kementerian PUPR, capaian penggunaan PDN dalam belanja infrastruktur PUPR tahun 2022 mencapai angka sebesar 93,4% atau senilai Rp112 triliun dari rencana sebesar Rp120 triliun.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana.



Sumber: Dok. SIG

TKDN Industri Kecil, Bagaimana Penghitungannya?

Penulis:

Ir. Nicodemus Daud, M.Si
Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR

Rezza Munawir, ST, MT, MMG
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Boyke Frahmata S.T., M.T
Staf Tim TKDN Konstruksi

TKDN semakin viral semenjak Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajarannya untuk menggunakan produk dalam negeri dan UMKK. Bagaimana cara kita sebagai konsumen mengetahui mana yang termasuk produk dalam negeri dan mana yang tidak termasuk produk dalam negeri? Untuk menjawab ini, Kementerian Perindustrian menerbitkan regulasi terkait sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau yang lebih populer disebut TKDN.

Namun selama ini sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN tersebut lebih populer penerapannya di kalangan

industri besar. Lalu, bagaimana penerapan sertifikasi TKDN untuk industri kecil?

Pertama-tama, kita perlu mengetahui definisi industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sedangkan, Industri Kecil (IK) merupakan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selanjutnya, untuk memfasilitasi penerapan sertifikasi TKDN untuk industri kecil, Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 yang mengatur Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN untuk Industri Kecil (TKDN IK). TKDN IK adalah besaran kandungan dalam negeri untuk industri kecil, dimana Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah komponen dari hasil produksi yang berasal dari dalam negeri, serta sertifikat TKDN IK merupakan bukti perolehan nilai TKDN IK berdasarkan penghitungan TKDN IK.

Kementerian Perindustrian juga memfasilitasi penerbitan sertifikat TKDN IK secara gratis melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs). SIINAs mengatur tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain

dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebaran data dan/atau informasi Industri.

Bagaimana cara menghitung TKDN IK? Penghitungan nilai TKDN IK dilakukan berdasarkan akumulasi dari KDN yang mewakili faktor produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk. Faktor produksi tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran. KDN yang dihitung untuk menentukan TKDN IK adalah sebagai berikut:

- a. Bahan/material langsung dengan komposisi 24% (dua puluh empat persen) dari nilai TKDN IK. Kandungan dalam negeri untuk bahan/material langsung diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila penyedia bahan/material langsung berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kandungan dalam negeri



Sumber: beritajatim.com

untuk bahan/material langsung diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila penyedia bahan/material langsung tidak berkedudukan di Indonesia.

- b. Tenaga kerja langsung dengan komposisi 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN IK. Kandungan dalam negeri untuk tenaga kerja langsung diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan tenaga kerja tetap. Kandungan dalam negeri untuk tenaga kerja langsung diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila tenaga kerja langsung berkewarganegaraan Indonesia. Kandungan dalam negeri untuk tenaga kerja langsung diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila tenaga kerja langsung berkewarganegaraan asing.
- c. Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) dengan komposisi 4% (empat persen) dari nilai TKDN IK. Kandungan dalam negeri untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) meliputi:
 - 1). Biaya alat kerja;
 - 2). Biaya air; dan/atau
 - 3). Biaya listrik.

Kandungan dalam negeri untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) diperhitungkan berdasarkan kedudukan penyedia biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*). Kandungan dalam negeri untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila penyedia biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) berkedudukan di Indonesia. Kandungan dalam negeri untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila penyedia biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) tidak berkedudukan di Indonesia.
- d. Biaya untuk pengembangan dengan komposisi 2% (dua persen) dari nilai TKDN IK. Kandungan dalam negeri untuk biaya pengembangan meliputi biaya :
 - 1). pendaftaran hak kekayaan intelektual;
 - 2). sertifikasi standar nasional Indonesia;
 - 3). sertifikasi industri hijau;
 - 4). sertifikasi halal;

- 5). biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk.

Kandungan dalam negeri untuk biaya pengembangan diperhitungkan berdasarkan kedudukan hukum pelaksana pendaftaran/sertifikasi atau penyedia biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk. Kandungan dalam negeri untuk biaya pengembangan yang pelaksana pendaftaran/sertifikasi atau penyedia biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk merupakan kementerian/lembaga atau entitas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen). Kandungan dalam negeri untuk biaya pengembangan yang pelaksana pendaftaran/sertifikasi atau penyedia biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk selain kementerian/lembaga atau entitas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

Penghitungan nilai TKDN IK dilaksanakan untuk masing-masing jenis dan spesifikasi produk. Penghitungan nilai TKDN IK tidak dapat dilakukan untuk Kegiatan usaha Industri tertentu dan/ atau produk yang dihasilkan dari kegiatan yang hanya meliputi pengepakan dan/atau pengemasan.

Penerbitan Sertifikat atau penolakan penerbitan Sertifikat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun. Nilai TKDN IK pada Sertifikat dicantumkan secara elektronik dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri pada kelompok tersendiri.

Nah, sekarang sudah jelas ya bagaimana ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN IK? Yuk, mari bersama-sama segera proses sertifikasi TKDN produk industri kecil atau UMKK!



Sumber: swa.co.id

Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Penggunaan Aspal Buton di Kementerian PUPR

Penulis:

Ir. Nicodemus Daud, M.Si
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Dr. Yolanda Indah Permatasari, S.E., M.M
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya

Andias Mintoharjo, S.T.
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Saat ini, data yang akurat merupakan suatu kekayaan baru yang berharga bahkan nilainya dapat lebih berharga daripada minyak sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara penancangan pelaksanaan sensus penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020. "Data ini adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah *new oil*, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang *valid* menjadi salah satu kunci pembangunan," ujar

Presiden Joko Widodo. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi terus berupaya untuk menghimpun dan menyediakan data terkait sumber daya konstruksi baik dari segi pasokan maupun kebutuhan.

Langkah strategis yang dilakukan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dalam menghimpun data tersebut adalah membangun jaringan data pasokan dengan

mitra asosiasi terkait sumber daya material dan peralatan konstruksi melalui Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) yang dapat diakses melalui simpk.pu.go.id. Melalui SIMPK, mitra asosiasi terkait sumber daya material dan peralatan konstruksi dapat menyampaikan data besaran dan ketersediaan pasokan (*supply*) material dan peralatan konstruksi, serta melakukan pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi termasuk dengan besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Salah satu asosiasi yang aktif untuk menyediakan data pasokan material adalah Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI). Dalam penyampaian data terbaru pada tahun 2022, ASPABI menyatakan bahwa keseluruhan kapasitas produksi tahunan aspal buton mencapai 1.368.600 ton/tahun yang berasal dari 15 (lima belas) anggota ASPABI. Keseluruhan kapasitas produksi tahunan tersebut terdiri atas Asbuton B5/20, Asbuton B50/30, Asbuton Pracampur, CPHMA, dan Asbuton Murni dengan rincian persentase yang dapat digunakan sebagai substitusi aspal minyak dapat dilihat pada tabel berikut.

untuk Tahun 2023 yang dapat dilihat pada **Tabel 8**. Sumber: ASPABI, 2022, yang mana kapasitas terbesar untuk: Asbuton Murni di wilayah Sulawesi berjumlah (2.000 ton/bulan); CPHMA di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara berjumlah (19.300 ton/bulan); B 50/30 di wilayah Sulawesi berjumlah (16.300 ton/bulan); Pracampur di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara berjumlah (8.800 ton/bulan); dan B 5/20 di wilayah Sulawesi berjumlah (3.200 ton/bulan).

Dengan ketersediaan informasi pasokan tersebut, dapat digunakan untuk membandingkan kemampuan pasokan Asbuton terhadap kebutuhan aspal nasional sebesar 1.200.000 ton/tahun. Berdasarkan data konsumsi aspal nasional pada 4 tahun terakhir, sebanyak 84% aspal minyak masih berasal dari impor dan sisanya sebesar 16% dipasok oleh PT Pertamina yang berasal dari produksi Cilacap (PDN). Sedangkan pemakaian Asbuton baru mengisi 1,5% kebutuhan aspal nasional, tentunya hal tersebut menyebabkan sebagian besar kapasitas produksi tidak terserap secara maksimal. Padahal apabila seluruh kapasitas produksi tersebut dapat terserap dan

No.	Subvarian Asbuton	Produksi/Bulan	Ceruk	% Substitusi Aspal Minyak
1	Murni	4.000	1	100%
2	CPHMA	63.500	2	90%
3	B 50/30	35.500	3	25%
4	Pracampur	13.500	4	20%
5	B 5/20	10.000	4	20%

Tabel 6. Sumber: ASPABI, 2022

Jenis produk Asbuton tersebut memiliki nilai TKDN 30% - 89% tergantung pada jenisnya yang dapat dilihat pada tabel berikut.

dikonversikan ke aspal minyak, dapat diproduksi aspal minyak sebesar 270.540 ton yang dapat digunakan untuk substitusi

Nama Produk Asbuton	Nilai TKDN	Kategori*
B 5/20	88,14%	Barang diwajibkan pakai
B 50/30	89,29%	Barang diwajibkan pakai
Asbuton Pracampur	30,21%	+ BMP menjadi Barang diwajibkan pakai
CPHMA	77,52%	Barang diwajibkan pakai
Asbuton Murni	83,39%	Barang diwajibkan pakai

Tabel 7. Sumber: ASPABI, 2022

*) Sesuai Permenperin No. 2 Tahun 2014 "Pedoman P3DN Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" dan PP No. 29 Tahun 2018 "Pemberdayaan Industri"

Di samping itu, ASPABI juga menyediakan data kapasitas pasokan Asbuton berdasarkan produsen tiap wilayah/regional

aspal minyak impor sebesar 36% dari jumlah impor sebesar 750.000 ton pada tahun 2021.

No.	Subvarian Asbuton	Sumatera	Jawa Bali Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku dan Papua
1	Murni	-	1.500	500	2.000	-
2	CPHMA	11.200	19.300	7.500	18.500	7.000
3	B 50/30	2.200	9.300	4.100	16.300	3.600
4	Pracampur	2.900	8.800	1.400	400	-
5	B 5/20	1.700	2.100	1.300	3.200	1.700

Tabel 8. Sumber: ASPABI, 2022

Berdasarkan data yang dipublikasikan PT Pertamina Patra Niaga, harga publikasi produk bitumen aspal minyak yaitu Argus juga memiliki tren yang cukup fluktuatif dan tidak pasti (*uncertain*), terutama di masa pandemi. Pada April 2020, harga Argus pernah mencapai titik terendahnya seharga \$179/MT dan pada awal tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Pada Juni 2022, harga Argus sudah naik 52% dan menyentuh angka \$594/MT yang didorong oleh kenaikan harga *Crude Oil* dan *Fuel Oil* serta gejolak perang Rusia - Ukraina. Perbandingan harga yang diperoleh dari ASPABI juga menyatakan rata-rata harga Asbuton Murni sebesar Rp 15 juta/ton lebih murah dibandingkan dengan harga Aspal Minyak pasaran yang mencapai Rp 17 juta/ton.

Maka dalam rangka mendorong penerapan penggunaan Asbuton pada pekerjaan infrastruktur di Kementerian PUPR sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), Tim P3DN Kementerian PUPR melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi telah melakukan kunjungan kerja ke PT Kartika Prima Abadi dan PT WIKA Bitumen di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Adapun beberapa rekomendasi dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut diantaranya:

- Perlunya melaksanakan *focus group discussion* (FGD) bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Bahan Jalan, Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan ASPABI untuk membahas terkait spesifikasi jenis, dan keunggulan dari Asbuton untuk dapat diterapkan pada pekerjaan infrastruktur di bidang jalan;
- Paket proyek TA 2022 yang menggunakan Aspal Modifikasi PG 70 dapat menggunakan Asbuton Murni PG 70 untuk menggantikan Aspal Impor dan diperlukan Surat Edaran Menteri PUPR bagi pengelola dan pengusaha jalan tol untuk menggunakan Asbuton Murni PG 70;
- Pembangunan jaringan jalan di lingkungan Ibu Kota

- Negara Nusantara diusulkan menggunakan Asbuton, baik Asbuton Murni PG 70 untuk Jalan Kelas I dan produk Asbuton olahan lainnya untuk Jalan kelas II, III, IV, dan V;
- Perlu dilakukan perencanaan pengaspalan ulang jalan lalu lintas berat untuk menggunakan Asbuton Murni PG 70 dalam perencanaan proyek TA 2023 dan seterusnya;
- Kebijakan Pemerintah dalam hilirisasi perlu juga diterapkan pada tata niaga industri Asbuton, sehingga kedepan bahan baku (*raw material*) Asbuton harus diproses terlebih dahulu menjadi produk olahan Asbuton sebelum dilakukan ekspor ke pasar regional dan internasional;
- Merekomendasikan kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan agar proyek *overlay runway*, pembangunan bandara baru, maupun perpanjangan lintasan untuk menggunakan Asbuton Murni PG 70; dan
- Merekomendasikan perluasan Pelabuhan Nambo sebagai pelabuhan muat Asbuton baik mentah maupun olahan.

Berdasarkan rekomendasi yang telah dirumuskan di atas, data kebutuhan Asbuton di Kementerian PUPR masih memerlukan penajaman dan perincian yang lebih detil dari Balai-balai di Direktorat Jenderal Bina Marga. Berdasarkan data yang diperoleh dari business matching yang telah dilaksanakan, diketahui hingga saat ini total rencana penggunaan atau kebutuhan Asbuton di Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 86.166 ton untuk pembangunan dan preservasi jalan sepanjang 1.459 km. Selain itu, agar Asbuton Murni dengan harga yang lebih murah dibandingkan Aspal Minyak dapat digunakan untuk kelas jalan III, IV, dan V, maka direkomendasikan agar dapat dilakukan revisi Lampiran Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.



Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden

Minimalisir Risiko Gempa dan Pulihkan Ekonomi Nasional Melalui Rumah Tahan Gempa Produksi dalam Negeri

Penulis:

Fatih Fauzi Mustafa, S.T.
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama

Boyke Frahmana, S.T., M.T.
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan *Ring of Fire*. Hal itu menyebabkan intensitas gempa bumi yang terjadi di Indonesia tergolong tinggi dengan kekuatan yang beragam. Menurut data yang dihimpun dari situs resmi BNPB, sepanjang tahun 2022 telah terjadi 51 kali gempa bumi yang memberikan dampak kerusakan terhadap 68.646 unit rumah warga dan 1.797 unit fasilitas umum. Dampak kerusakan gempa bumi terhadap bangunan menunjukkan ketidaksiapan

antisipasi gempa bumi baik dari segi fisik. Padahal hingga saat ini, belum ada yang dapat meminimalisir intensitas gempa bumi, serta belum ada yang dapat memprediksi secara akurat mengenai kapan akan terjadinya gempa dan seberapa besar kekuatan gempa akan terjadi pada wilayah tertentu.

Mengutip pernyataan Kepala BMKG, Dwikorta Karnawati setelah terjadinya gempa bumi di Kabupaten Cianjur, bahwasanya gempa tidaklah membunuh dan melukai, justru

bangunanlah yang membunuh dan melukai manusia. Gempa bumi di Kabupaten Cianjur merupakan salah satu contoh gempa yang mengakibatkan banyaknya rumah yang rusak. Gempa bumi yang terjadi pada 21 November 2022 itu telah merusak 56.278 unit rumah serta 1.021 unit fasilitas umum. Kerusakan bangunan akan memperbesar risiko bencana pada suatu wilayah, antara lain berdampak kepada kerugian materil yang besar serta bertambahnya korban jiwa.

Risiko bencana terhadap suatu wilayah, salah satunya gempa bumi, dapat diminimalisir dengan cara mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan rumus pengkajian risiko bencana, terdapat 3 faktor yang memengaruhi besaran risiko bencana pada suatu wilayah, yaitu: Kerentanan (*Hazard*), Kerentanan (*Vulnerability*), Kapasitas terkait bencana (*Capacity*). Dalam rumus tersebut, *Hazard* dan *Vulnerability* berbanding lurus dengan risiko bencana yang akan terjadi, sedangkan *Capacity* berbanding terbalik dengan risiko bencana yang akan terjadi. Hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan *capacity* agar dapat meminimalisir risiko daerah terkena dampak bencana. Peningkatan *capacity* dapat dilakukan dengan penerapan bangunan tahan gempa.

Regulasi mengenai bangunan tahan gempa telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang tertuang pada SNI 1726:2019 dan telah diadopsi menjadi regulasi SNI yang berlaku wajib oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Peraturan Menteri PU No. 29 Tahun 2006. Melalui sambutan Menteri PUPR, M Basuki Hadimuljono, dalam

kegiatan Sosialisasi dan Workshop Nasional Penerapan SNI 1726:2019, Menteri Basuki menegaskan pentingnya perubahan paradigma menjadi 'membangun yang lebih baik dan aman'. Dengan memahami regulasi dan pentingnya penerapan bangunan tahan gempa, upaya preventif dapat dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya risiko pasca bencana.

Salah satu jenis dari bangunan tahan gempa yang umum dijumpai di masyarakat adalah Rumah Tahan Gempa (RTG). Inovasi terkait RTG telah banyak dilakukan oleh produsen dalam negeri untuk memudahkan masyarakat memiliki RTG sebagai opsi rumah tinggal maupun opsi rumah rekonstruksi pasca bencana. Pemerintah melalui Kementerian PUPR bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah menerapkan pembangunan RTG produksi dalam negeri pada wilayah terdampak bencana. Salah satunya pada gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Beberapa jenis RTG produksi dalam negeri yang dibangun pada wilayah rekonstruksi gempa bumi di Kabupaten Cianjur yaitu Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Banua Tadulako (Rumbako), Domus, dan Rumah Kita. Hal ini menandakan bahwasanya pemerintah mengutamakan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri sebagai rangka akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disamping juga sebagai upaya rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden RI Joko Widodo yang tertuang pada Inpres Nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional



Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden



Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, menegaskan untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri, meningkatkan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 produk tayang dalam Katalog Elektronik dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%. TKDN merupakan besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa sedangkan BMP merupakan nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan; memberdayakan lingkungan (*community development*) serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.

Selain dimanfaatkan oleh pasar domestik, RTG produksi dalam negeri juga dapat menjadi produk ekspor. Mengutip

pernyataan Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi Andi Rizal, ekspor produk RTG tersebut penting untuk mendukung akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selain memanfaatkan peluang pasar domestik yang masih sangat besar.

Menyadari pentingnya penerapan RTG, diharapkan produsen RTG dalam negeri terus berinovasi untuk memproduksi RTG yang tidak hanya berkualitas, namun juga terjangkau serta proses pengerjaannya tidak memakan waktu yang lama. Inovasi lain yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan nilai seni pada segi arsitektural tanpa mengesampingkan segi struktural agar kedepannya dapat lebih menarik bagi semua kalangan. Hal tersebut penting sebagai pertimbangan agar masyarakat dapat beralih menggunakan RTG sebagai tindakan preventif dalam meminimalisir risiko terjadinya bencana gempa bumi sesuai arahan Menteri Basuki. Dengan berkembangnya produksi dan jumlah produsen RTG dalam negeri untuk pemanfaatan domestik maupun ekspor, dapat meminimalisir risiko bencana gempa bumi serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.



Sumber: centralmachinery.co.id

Yuk Cari Tahu Apa Sih Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa?

Penulis:

Indri Eka Lestari

Staf Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Informasi seputar Pengadaan Barang dan Jasa menjadi topik perbincangan masyarakat. Pasalanya, proses ini merupakan awal mula terselenggaranya pembangunan infrastruktur. Siapa saja sih yang berwenang dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa? Mereka biasa disebut dengan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Yuk kita cari tahu bersama mengenai Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa.

Pelaku pengadaan barang/jasa adalah para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa melalui swakelola

maupun penyedia. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada 8 Pelaku Pengadaan dengan tugas dan Fungsi yang berbeda, yang terdiri dari :

1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran atau PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat

daerah yang bersangkutan. Setiap Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran. PA bertugas untuk melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan konsolidasi PBJ, menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi yang gagal, menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan penyelenggaraan swakelola, menetapkan tim teknis, menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes, menyatakan tender/seleksi gagal, menetapkan pemenang.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat sebagai PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah.

Dalam menjalankan tugasnya PPK memiliki tugas Menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa, menetapkan spesifikasi teknis/KAK, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit Rp 200 juta, mengendalikan kontrak, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian PA/KPA, menyerahkan hasil kerja pelaksana, menilai kinerja penyedia, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

4. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

5. Pokja Pemilihan

Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia.

1. Merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negeri/TNI/Polri/personel/ lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan.

6. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan adalah Perorangan, Badan Usaha atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau sebelumnya dikenal dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/D/I. Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui proses swakelola apabila pelaksanaannya adalah UKPBJ K/L/D/I atau melalui proses pemilihan apabila dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.

7. Penyelenggaraan Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Terdiri dari Tim Persiapan, Pelaksana, dan Pengawas yang bertugas untuk:

- Tim Persiapan yaitu memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- Tim Pelaksana yaitu memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- Tim Pengawas yaitu Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

8. Penyedia

Penyedia barang jasa adalah istilah untuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Penyedia wajib memiliki beberapa kriteria diantaranya :

- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dikecualikan bagi Penyedia Barang Jasa yang



- baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang Jasa;
 - f. Dalam hal Penyedia Barang Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
 - h. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
 - i. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Lainnya harus memperhitungkan Sisa Kemampuan paket (SKP) sebagai berikut: $SKP = KP - P$; $KP =$ nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
 - a). untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;
 - b). untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
 - j. jumlah paket yang sedang dikerjakan.
 - k. jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - l. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - m. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
 - n. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - o. Tidak masuk dalam Daftar Hitam
 - p. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - q. menandatangani Pakta Integritas.



**HARI AIR
DUNIA KE-31
TAHUN 2023**

**BE THE CHANGE YOU WANT
TO SEE IN THE WORLD**



Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110